

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Walaupun secara umum apa yang dilaporkan dalam LAKIP ini telah memiliki tingkat capaian yang baik, tetapi belum berarti visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan berupa “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang Unggul dalam Meningkatkan Kesajahteraan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan tahun 2016 akan tercapai dengan mudah. Masalah keberhasilan yang diperoleh saat ini dapat mempengaruhi daya kritis, oleh karena itu seharusnya seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan tetap mempertahankan prestasi yang telah ada, dan bila mungkin dikembangkan lebih jauh.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat memacu penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada umumnya, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan secara keseluruhan dapat direalisasi.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur selalu tercurah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2010 dibuat sebagai pemenuhan atas kewajiban pertanggungjawaban kinerja badan sesuai dengan tuntunan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkannya indicator kinerja bagi instansi pemerintah adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam mencapai visi dan misi organisasi dalam wujud pengelolaan pemerinatahan yang baik (good governance) pilar-pilar utama yang menyangga terciptanya good governance meliputi : transparasi, partisipasi dan akuntabilitas.

Ditetapkannya TAP MPR RI No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ditindak lanjuti dengan undang-undang No 28/1999 tentang penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ini menunukan bahwa bangsa Indonesia bertekad sungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang bersih. Hal ini dijabarkan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia No 7/1999 tentang akuntabilitas Kinerja Peerintah, maka konsep penyusunan kinerja mnjadi tuntunan yang tidak boleh ditawar dan dihindari.

Sejalan dengan hal tersebut, dengan berakhirnya tahun anggaran 2010 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Tahunan atas Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2006-2011.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan Evaluasi bagi peningkatan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam Rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan yang akan datang.

Buntok, Januari 2011

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATA
Kepala

Ir. EDI KRISTIANTO, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19611225 199003 1 008

